

## DAFTAR REFERENSI

### BUKU

- A, Suyanto. Hak Kekayaan Intelektual Dan Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- A.Zen Umar Purba, *Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia* (Jakarta, 2002).
- Ahmad M. Ramli and Miranda Risang Ayu, *Indikasi Geografis Dan Kekayaan Tradisi Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT Refika Aditama, 2019).
- Ahmad Mahmud, *Teknik Simulasi Dan Permodelan* (Yogyakarta: Universitas Gadjahmada, 2008).
- Anambas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan. Profil Komoditas Unggulan Daerah. Anambas, 2022.
- B Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Gadjahmada, 2020).
- Dwi Suryahartati and Nelli Herlina, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual* (Jambi: UNJA Publisher, 2022).
- Goldstein, Paul. *International Intellectual Property Law*. New York: Foundation Press, 2006.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Insan Budi Maulana et al., *Hak Kekayaan Intelektual (Teori Dan Permasalahan)* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2024) .
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Cetakan I. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Ladas, Stephen. *Patents, Trademarks, and Related Rights*. Cambridge: Harvard University Press, 1975.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System* (New York: Russel Sage Foundation, 1975) .

- Mahadi. Hak Milik Dalam Sistem Perdata Nasional. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1981.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011.
- Mc Keough and Stewart, *Intellectual Property In Australia 2nd Edition* (Sydney: Butterworth, 1998).
- R.Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermedia, 2001.
- Siti Ismaya et al., *Pemberdayaan Hukum: Memperkuat Akses Masyarakat Terhadap Keadilan* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2025).
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sulistianingsih, Dewi. "Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia." In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Semarang: Universitas Semarang, 2021.
- Suryahartati, Dwi, and Nelli Herlina. Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual. Jambi: UNJA Publisher, 2022.
- Sutedi, Adrian. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Zadjuli, Suroso Imam. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. 2007: Airlangga University Press, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983).

#### **SKRIPSI/TESIS**

- I Nengah Robi Sanjaya, "Peran Lembaga MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) Dalam Peningkatan Ekspor Kopi Robusta Di Desa Pupuan Kabupaten Tabanan" (Universitas Mahasaraswati Denpasar) (2022).
- Ima Aisyah Sallatu, "Analisis Pangsa Pasar Dan Tataniaga Kopi Arabika Di Kabupaten Tana Toraja Dan Enrekang" (Institut Pertanian Bogor, 2006).
- Juhardiyanti. "Analisis Potensi Indikasi Geografis Beras Ta'Daga Di Kecamatan Sinjai Barat Guna Memperoleh Perlindungan Hukum." Universitas

Hasanudin, 2019.

Laode Rudita, "Hak Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Konsumen (Studi Tentang Indikasi Geografis Dari Perspektif Kepentingan Konsumen)" (Universitas Indonesia, 2011) Hal 42.

Noviyanti, Herlin. "Analisis Yuridis Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum." Universitas Jambi, 2021.

Suhadi. "Potensi Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Provinsi Riau Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Loka." Universitas Islam Riau, 2021.

#### **JURNAL/LAPORAN**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, *Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2024* (Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024).

Budi Sutrisno et al., "Pembaharuan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia Dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan Adat (Studi Di Pulau Lombok)," *Dialogia Juridicia* 13, no. 2 (2022).

Dewi, Lily Karuna, and Putu Tuni Cakabawa Landra, "Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2019).

Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas, *Laporan Kajian Komoditas Unggulan Pala Tiangau* (Anambas, 2022).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis* (Jakarta, 2019).

Elias G. Carayannis and David F.J Campbell, "Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and How Do Knowledge, Innovation and the Environment Relate To Each Other? A Proposed Framework for a Transdisciplinary Analysis of Sustainable Development and Social Ecology," *International Journal of Social ecology* 1, no. 1 (2010).

Hendra Djaja, "Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.18, No. 2 (2013)

- Irfana, Ardhana Berlin, and RakhmitaDesmayanti. "Kain Tenun Baduy Sebagai Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Lebak Provinsi Banten." *Amicus Curiae* 2, no. 1 (2025).
- Jainuddin, Asyraf, Hasbir Paserangi, and Marwah. "Karakteristik Kayu Sanrego (Lunasia Amara Blanco) Sebagai Salah Satu Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Bone." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023).
- Karim, Asma, and Dayanto. "Perlindungan Hukum Dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru." *Recht Vinding* 5, no. 3 (2016).
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Draft Naskah Akademik : Peraturan Perundang-Undangan RUU Tentang Merek* (Jakarta, 2015).
- Monarisya Rialin, Zainul Daulay, and Delfiyanti Delfiyanti, "Pelaksanaan Indikasi Geografis Oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (Mpig) Pasca Sertifikasi Di Kepulauan Meranti Dan Solok," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023).
- Muhammad Addi Fauzani, "Harmonisasi Pengaturan Perlindungan Kekayaan Intelektual Oleh Pemerintah Daerah," *Journal Of Intellectual Property* 7, no. 1 (2024).
- Muhammad Darman, "Komoditas Perkebunan Strategis Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil: Studi Kasus Pala Di Kabupaten Kepulauan Anambas," *Jurnal Agribisnis Kepulauan*, Vol.3, No. 1 (2023).
- Nur Halimah Widowati, "Partisipasi Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Penyusunan Undang-Undang No.34 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang KSDAHE," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025).
- R.Siregar. "Urgensi Perlindungan Indikasi Geografis Pada Komoditas Lokal Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 3, no. 51 (2021).
- Sari, D. A., and Y. Nugroho. "Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Produk Lokal: Studi Kasus Komoditas Pertanian." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2023).
- Yatini, "Pelaksanaan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Melindungi Warisan Budaya Di Kalimantan Timur," *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.13, No. 2 (2021).

Zahida, Ibnu Maulana, Sri Reski Putri, and Aditya Satrio Wicaksono. "Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Kabupaten Trenggalek)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 2 (2021).

## **INTERNET**

Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian, "Tiangau Agribun Varietas Pala Berproduksi Tinggi," *Kementerian Pertanian Republik Indonesia*, Diakses Tanggal 27 Juni 2025, <https://pustaka.bppsdp.pertanian.go.id/index-berita/tiangau-agribun-varietas-pala-berproduksi-tinggi>.

Direktorat Perbenihan Kementerian Pertanian, "Mengenal Pala Varietas Unggul Nasional," *Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian*, Diakses tanggal 27 Juni 2025, <https://ditjenbun.pertanian.go.id/mengenal-pala-varietas-unggul-nasional/>.

*Karakteristik Dan Potensi Pala Di Wilayah Kepulauan Anambas*. Jakarta, 2021.

Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Laporan Tahunan Indikasi Geografis Indonesia*. Jakarta, 2022.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Indonesia, 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1994 Tentang Agreement Establishing the World

Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

